

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada proses penyusunan karya ilmiah, penulis melakukan perbandingan antara judul penelitian yang sedang disusun dengan beberapa penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Evalia Nuranita, Herbasuki (2021) dengan judul Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.	Fokus penelitian dalam karya ilmiah tersebut adalah Untuk memahami dan menggambarkan bagaimana kolaborasi yang terjalin dalam upaya penanggulangan stunting di Desa Kalirandu.	Hasil penelitian pada karya ilmiah ini dapat disimpulkan Kolaborasi yang telah dibangun selama ini menunjukkan hasil yang cukup efektif, terbukti dari fenomena dialog tatap muka dan komitmen yang ditunjukkan oleh setiap aktor dalam proses tersebut. Namun, masih ada beberapa faktor penghambat yang terkait dengan sumber daya manusia. Beberapa di antaranya adalah rendahnya partisipasi masyarakat melalui kader stunting, dominasi bidang kesehatan dalam penanganan stunting di Desa Kalirandu, kurangnya komitmen dari kepala desa, serta isu terkait pengunggahan data.

2.	Sukanti, Nur Faidati (2021) dengan judul Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman.	Fokus penelitian ini untuk memahami model tata kelola kolaboratif serta peran masing-masing pemangku kepentingan. Selain itu, untuk mengetahui eksplorasi desain kelembagaan yang terbentuk dalam upaya penanggulangan masalah stunting di Kabupaten Sleman.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan secara umum, pelaksanaan kerja sama yang melibatkan Berbagai pihak telah menjalankan kerjasama dengan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar hasilnya lebih optimal. Salah satunya adalah ketiadaan forum komunikasi khusus di tingkat Pemerintah Kabupaten, serta peran pihak swasta yang masih tergolong kurang signifikan. Selain itu, terdapat juga beberapa kendala lainnya, seperti penolakan dari masyarakat, lingkungan yang kurang mendukung, dan kondisi pekerjaan orang tua yang dapat mempengaruhi pola pengasuhan anak.
3.	Chusnul Afrida, Amirul Mustofa, Kristyan Dwijosusilo (2024) dengan judul Colaborative Governance dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten	Fokus penelitian ini untuk menilai bagaimana tingkat pencapaian keberhasilan dalam program	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pada indikator ini, sasaran kebijakan sumber daya telah dijalankan dengan efisien dan menunjukkan adanya kerjasama yang baik dalam program penurunan angka stunting, keterlibatan

	Sidoarjo.	kebijakan dengan mengkaji pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting yang terjadi di Kabupaten Malang.	berbagai pihak dalam proses upaya pencegahan stunting telah dijalankan dengan optimal. Meski demikian, masih terdapat beberapa kendala yang harus diatasi seperti masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap manajemen yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting.
4.	Ipan, Hanny, Evi (2021) dengan judul Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting.	Penelitian ini berfokus pada pengungkapan pelaksanaan proses kolaborasi dalam upaya pencegahan stunting di UPTD Puskesmas Ciampel.	Hasil penelitian menunjukkan Kerja sama dalam menangani masalah stunting di UPTD Puskesmas Ciampel telah menunjukkan kemajuan yang baik, berkat kontribusi dari sektor swasta dan partisipasi masyarakat. Meskipun keterlibatan masyarakat masih terbilang kurang aktif, mereka menunjukkan respons yang positif terhadap program-program yang dirancang pemerintah untuk mengatasi isu stunting.
5.	Septiana Wulan Hapsari (2023) dengan judul Collaborative	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama pemerintah dalam upaya percepatan

	<p>Governance Dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Temanggung.</p>	<p>menganalisis konsep serta praktik governance kolaboratif yang terjadi dalam upaya percepatan penanggulangan stunting di Kabupaten Temanggung.</p>	<p>pencegahan stunting di Kabupaten Temanggung berlangsung dengan baik dan efektif. Proses kolaborasi dilaksanakan melalui konvergensi stunting melalui tim koordinasi dan kelompok kerja, dimana dalam proses kolaborasi dilaksanakan melalui 8 aksi konvergensi dengan melaksanakan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive. Sehingga menunjukkan hasil yang baik yaitu dengan adanya penurunan angka stunting sebesar 2,9% dari 20,5% ke angka 17,60% dan komitmen antar anggota konvergensi untuk menangani stunting secara bersama-sama.</p>
6.	<p>Allya, Bambang, Anggaeny (2023) dengan judul Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada analisis proses kolaboratif dalam pemerintahan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting dalam menangani masalah stunting sudah berjalan dengan baik, termasuk komunikasi antar</p>

		<p>menghambat dan pendukung collaborative governance dalam pencegahan stunting di Kota Surabaya.</p>	<p>pihak yang juga lancar. Hasilnya, angka stunting yang terjadi terus menurun setiap tahunnya. Namun, yang menjadi kendala utama terletak pada tingginya mobilitas penduduk di Kota Surabaya, sehingga tim kesehatan kesulitan untuk melakukan survei langsung ke rumah-rumah warga yang terkena stunting.</p>
7.	<p>Anggara Setya Saputra (2022) dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga.</p>	<p>Fokus pada penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses pelaksanaan kebijakan implementasi yang dilakukan dari perspektif peraturan, aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, struktur organisasi yang menjalankan kebijakan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Purbalingga telah berlangsung dengan baik. telah di anggap berhasil karena fokus utamanya lebih menitikberatkan pada berbagai aspek yang memungkinkan pelaksanaannya berjalan dengan lancar, termasuk diantaranya yaitu dari sisi kebijakan, keterlibatan pihak dan organisasi terkait serta dari faktor lingkungan. Penerapan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga telah</p>

		<p>hingga analisis mengenai Faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi setiap tahapan dalam implementasi kebijakan.</p>	<p>dilakukan dengan upaya mengkolaborasikan program kesehatan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam usaha untuk mengurangi kasus stunting yang ada di Kabupaten Purbalingga.</p>
8.	<p>Qori Hiayasa, Fitri Kurnianingsih, Agus Hendra (2023) dengan judul Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses Collaborative Governance berkontribusi terhadap penurunan kasus stunting yang terjadi di Provinsi Bintan.</p>	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bintan sudah berjalan baik. Hal ini terlihat dari penurunan prevalensi stunting, yaitu sebesar 5,23% di tahun 2021 menjadi 3,41% atau 383 kasus pada tahun 2022. Hanya saja, masih perlu ada upaya lebih untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan para pemangku kepentingan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.</p>
9.	<p>Rizka Aprila (2022) dengan judul Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program</p>	<p>Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam upaya pencegahan stunting telah menunjukan kemajuan yang</p>

	<p>Pencegahan Stunting di Puskesmas Kertek 2 Kabupaten Wonosobo.</p>	<p>proses kolaborasi yang terjadi antara setiap stakeholder dan juga peran mereka dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan dalam upaya pencegahan terjadinya stunting di Puskesmas Kertek 2 Kabupaten Wonosobo.</p>	<p>baik, namun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait peran pemimpin dalam mendorong kerjasama, keterlibatan partisipasi sektor swasta, dan belum adanya rembuk stunting di tingkat puskesmas. Pada awalnya, ikut serta dorongan dari masing-masing pihak juga masih rendah. Meski kolaborasi ini berhasil menurunkan stunting sebesar 0,31 persen pada tahun 2021 hingga 2022, namun aplikasi yang digunakan dalam proses stunting memberikan hasil stunting yang jauh lebih tinggi.</p>
10.	<p>Ahmad Sufi (2021) dengan judul Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19.</p>	<p>Fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses dinamika Collaborative Governance yang terjadi selama pandemi COVID-19 berdampak pada</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak kegagalan pemerintah dan organisasi dalam menerapkan undang-undang tentang stunting di Jawa Timur yang mana masih menghadapi adanya ketidakseimbangan dalam peran antara pemerintah dan lembaga dalam menerapkan kebijakan yang telah</p>

		stunting.	ditetapkan. Kesenjangan ini tercermin dalam temuan bahwa peran pemerintah masih terlalu mendominasi dan cenderung lambat dalam melaksanakan kebijakan yang sudah direncanakan di tingkat daerah. Selain itu, aturan hukum yang mewajibkan pihak swasta untuk ikut bertanggung jawab dalam penanganan stunting juga masih lemah.
--	--	-----------	---

Perbandingan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, terletak pada progres kemajuan serta program dalam mengembangkan aktivitas para pihak atau lembaga, karena mayoritas dalam *Collaborative Governance* sebuah kolaborasi tidak berjalan sesuai tujuan atau tidak efektif. Selain itu, penelitian yang kini dilakukan para peneliti ini memiliki beberapa kelebihan, yakni sama-sama membahas topik kolaborasi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah. Namun perbedaan terdapat pada lembaga-lembaga yang terlibat serta fokus persoalan yaitu untuk mengatasi masalah stunting di Kota Malang. Serta kerjasama yang diikuti oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga yang terkait pada *Collaborative Governance* untuk mencapai tujuan serta memecahkan sebuah permasalahan secara bersama-sama.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1. *Collaborative Governance*

Menurut Ansell dan Gash (2008), *Collaborative Governance* adalah sebuah Paradigma pemerintahan yang disebutkan di atas mengidentifikasi satu atau lebih organisasi publik yang secara diam-diam terlibat dengan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengembangan keputusan. Proses ini berlangsung

secara formal dan berfokus pada pencapaian kesepakatan yang saling disepakati bersama, fokus pada pengembangan atau pelaksanaan kebijakan publik dan bertujuan untuk menyelidiki dan menerapkan kebijakan publik dengan benar, serta untuk mendukung program atau inisiatif publik. Kolaborasi adalah proses kerja sama antar beberapa organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai sendirian. Pada konsep tata kelola (governance), urusan-urusan publik yang sebelumnya hanya ditangani pemerintah kini dikerjakan secara kolaboratif dengan pihak-pihak lain, termasuk sektor swasta dan masyarakat. Hal ini mengurangi dominasi peran pemerintah, sehingga menciptakan ruang bagi demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan urusan publik.

Dalam *collaborative governance*, terdapat tiga aktor utama yang memainkan peran penting, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiganya bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan, sehingga pemerintah tidak lagi berperan menjadi pihak tunggal yang mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah yang tidak dapat ditangani secara individu oleh pemerintah. Dan membutuhkan pihak lain karena keterbatasan pemerintah dalam kemampuannya untuk memecahkan sebuah permasalahan yang sedang terjadi. Peran pihak swasta dalam kolaborasi ini adalah untuk memberikan dukungan secara finansial dan harus mampu dan membantu dalam pelaksanaan program pemerintah. Dalam kolaborasi ini pihak swasta juga diharapkan tidak fokus pada kepentingan pribadi mereka, atau hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi saja. *Collaborative governance* sebagai proses kolektif yang mana setiap intervensi memiliki bobot yang signifikan dalam pengambilan Keputusan, sehingga setiap pihak yang terlibat mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengungkapkan aspirasi mereka selama proses yang sedang berlangsung.

Model *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) yang terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Starting Condition (Kondisi Awal)

Pada tahap kondisi awal hubungan antar pemangku kepentingan, setiap aktor memiliki latar belakang yang berbeda dan karakteristik unik yang

mungkin berkontribusi, perbedaan ini dapat mengakibatkan terjadinya hubungan asimetris dalam interaksi yang telah berlangsung sebelumnya.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Ryan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ansell dan Gash telah mengidentifikasi terdapat tiga komponen utama yang diperlukan untuk menciptakan kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelolaan manajemen yang baik dan cukup memadai sangat penting untuk mendukung berjalannya proses kolaborasi;
- b. Pengelolaan kemampuan untuk menerapkan dan mempertahankan dalam kredibilitas teknis;
- c. Memastikan agar kolaborasi tersebut dapat dioptimalkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Desain Kelembagaan (Institutional Design)

Ansell dan Gash menjelaskan bahwa Desain Intitusional merujuk pada protokol dasar dan aturan-aturan fundamental yang mengatur kolaborasi, dengan penekanan khusus pada legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi tersebut. Dalam konteks kolaborasi, sangat penting bagi pemerintah untuk menunjukkan sikap yang terbuka dan inklusif.

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Model proses kolaborasi berperan penting dalam membantu meningkatkan kerjasama secara bertahap. Dalam analisisnya, Gray yang dikutip oleh Ansell dan Gash mengidentifikasi tiga tahapan kunci penting dalam proses kolaborasi yaitu *problem setting* penentuan permasalahan (*problem setting*), penentuan tujuan (*Direction Setting*), dan implementasi. Berikut adalah tahapan-tahapan yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yaitu sebagai berikut:

- a. Dialog tatap muka (*Face to face*)
- b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)
- c. Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*)
- d. Pemahaman bersama (*Share Understanding*)
- e. Hasil Sementara

Ansell and Gash (2007:228) menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) indikator yang menggambarkan proses terbentuknya *Collaborative Governance* yang melibatkan oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, indikator-indikator tersebut antara lain :

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Pada tahap dialog tatap muka, diharapkan semua pihak yang terlibat mampu membangun dan menciptakan rasa percaya satu sama lain, saling menghormati dan empati, serta mencapai pemahaman yang sama. Selain itu, komitmen terhadap proses kolaborasi yang direncanakan dan akan dilaksanakan juga menjadi hal yang sangat penting (Ansell and Gash, 2007:558). Pertemuan langsung ini sangat krusial dalam memulai suatu kerjasama, karena tanpa adanya pertemuan langsung pada awal kerjasama, bisa menimbulkan hambatan dalam kelancaran proses kerjasama tersebut.

2. *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Kepercayaan sendiri adalah elemen krusial dalam proses kolaborasi. Sebab, dalam setiap proses kolaborasi yang dimaksud bukan hanya tawar-menawar, melainkan juga pengembangan kepercayaan diantara pihak-pihak yang terlibat. Sehingga, kepercayaan tidak akan berkembang secara bertahap, melainkan akan memerlukan waktu yang cukup lama, sebab kepercayaan akan sangat penting untuk kelangsungan dan keberhasilan jangka panjang pada proses kolaborasi tersebut.

3. *Commitment to The Process* (komitmen terhadap proses)

Pada tahapan ini, Komitmen terhadap proses sangat penting untuk membantu menetapkan gagasan mendasar bahwa perundingan adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan ketika menyelesaikan suatu masalah yang muncul. Dalam pelaksanaannya, komitmen juga memerlukan langkah-langkah yang jelas, adil, dan transparan dari semua pihak yang terlibat.

4. *Shared Understanding* (saling memahami)

Yaitu saat para pemangku kepentingan dalam sebuah kolaborasi secara bersama-sama perlu mengembangkan pemahaman bersama tentang pencapaian kolektif pada suatu titik tertentu. Pemahaman bersama juga

dapat diartikan sebagai proses dimana sekelompok orang menyelaraskan pemahaman mereka terhadap suatu pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi.

5. *Intermediate Outcome* (hasil akhir yang dicapai)

Pada tahap ini diharapkan tercapai kesepakatan mengenai hasil akhir yang diinginkan dalam sebuah kolaborasi. Melalui perancangan dan perumusan hasil akhir tersebut, diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan serta komitmen yang akan memotivasi setiap pemangku kepentingan, hal ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sehingga bersama-sama dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

2.2.2 Prinsip *Collaborative Governance*

Untuk memulai sebuah kerjasama dalam bentuk kemitraan penting bagi semua pihak untuk memiliki arahan dan prinsip yang jelas sehingga tanggung jawab dan peran masing-masing dapat dipahami dengan baik. Kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui sedang dijalankan sesuai dengan prinsip dan komitmen yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan terhadap beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Keserasian dan keterpaduan antara kebijakan moneter, fiskal, anggaran, dan sektor riil.

Melalui penerapan kebijakan moneter dan fiskal yang efektif, pemerintah dapat mendorong peningkatan pertumbuhan efisiensi, produktivitas, dan stabilitas, serta kesetaraan dalam distribusi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mencapai beragam tujuan penting yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mulai dari pemberdayaan masyarakat, pemerataan kesempatan, dan pertumbuhan pembangunan ekonomi hingga peningkatan kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sistem manajemen yang baru. Semua ini akan dilakukan sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta hak asasi manusia. Selain itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan di berbagai bidang akan semakin lancar dan membuahkan hasil. Dalam

setiap tahapan perkembangan, penting untuk melakukan evaluasi dan pembelajaran yang dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan keberhasilan negara lain. Hal ini akan memungkinkan kebijakan untuk selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pemberdayaan (*empowering*)

Sebagian masyarakat memiliki potensi dalam kemampuan yang dimilikinya. Namun, terdapat hambatan karena terbatasnya modal dan juga penyaluran teknologi. Kelemahan ini perlu diakui dan diperbaiki melalui program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah serta mitra swasta. Agar seluruh masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dan memberikan sumbangsih yang besar dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proyek pembangunan.

Pemberdayaan bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan dengan fokus pada desentralisasi pengambilan keputusan, sehingga dapat mencapai hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Pembangunan yang difokuskan pada intinya adalah meningkatkan kemampuan individu dan lembaga (*capacity building*), yang merupakan hal penting bagi pemerintah daerah karena mencerminkan kemandiriannya dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang strategis. Prinsip dasar dari kemitraan ini adalah bekerja sama untuk saling menguntungkan dalam mengelola kontribusi sumber daya dari berbagai pihak dalam setiap kegiatan layanan publik. Setiap organisasi tentunya mempunyai keterbatasan pada sumber daya, sehingga kerjasama ini dirancang untuk menggabungkan sumber daya yang ada demi menghasilkan layanan publik yang bermutu kedepannya.

Seigler (2011 : 968-870) mengemukakan terdapat delapan prinsip utama yang berkaitan dengan penerapan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yaitu sebagai berikut :

1. Warga masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam proses produksi barang publik,

2. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan memobilisasi sumber daya serta aset yang dimiliki, agar dapat mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik,
3. Tenaga profesional harus mempunyai pemahaman menyeluruh tentang keahliannya sendiri dengan tujuan untuk membantu memberdayakan warga masyarakat umum,
4. Kebijakan harus berpartisipasi dalam semua diskusi publik mengenai musyawarah publik secara terbuka dengan tenang,
5. Kebijakan sebaiknya harus mencakup unsur kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan,
6. Kebijakan yang ditetapkan harus bersifat strategis,
7. Kebijakan perlu mengubah struktur kelembagaan guna untuk memberdayakan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah publik nantinya,
8. Kebijakan yang diterapkan harus mendukung dan berpegang pada prinsip akuntabilitas.

Tata kelola kolaboratif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dan struktur yang termasuk dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik serta pengelolaannya. Partisipasi konstruktif masyarakat memainkan peran penting dalam kerangka kerja lembaga publik, tujuan utamanya adalah untuk mencapai kepentingan bersama, yang tentunya tidak dapat terwujud tanpa keterlibatan aktif dari sektor swasta dan masyarakat itu sendiri (Emerson, Nabatchi, dan Balogh, 2011: 2).

2.2.3 Kegagalan *Collaborative Governance*

Dalam tata kelola kolaboratif, terdapat sejumlah kriteria yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu kolaboratif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dengan jelas apakah praktik kolaborasi dalam tata kelola ini akan berhasil atau menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan kolaborasi, ada beberapa faktor yang

dapat menjadi hambatan dalam kelancaran pelaksanaan suatu kerjasama. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan kolaborasi, termasuk partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat. Alasan tersendatnya kerjasama dan keterlibatan adalah disebabkan oleh beberapa faktor, terutama terdapat tiga faktor yang berperan penting, yaitu faktor budaya, institusi, dan politik. (Governance of Canada, 2008) Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing faktor tersebut;

1. Faktor Budaya

Sebuah kolaborasi mungkin tidak akan dikatakan berhasil karena terdapat kecenderungan budaya yang lebih menekankan pada prosedur, terdapat rasa ketakutan dan kurang berani untuk mencoba hal-hal baru serta mengambil resiko. Agar kolaborasi yang efektif dapat terjalin, sangat penting bagi para penyelenggara layanan publik dan pemimpin mereka untuk mengembangkan keterampilan serta kesiapan yang diperlukan dalam membangun kemitraan yang praktis dengan fokus utama pada pencapaian hasil. Mungkin saja kita mengabaikan konvensi dan melakukan segala sesuatunya dengan pendekatan kolaboratif. Namun, ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang terikat oleh prosedur baku dan cenderung enggan untuk mengambil langkah yang berisiko, kita sering kali merasa terhambat menjadi lebih rumit dalam keberhasilan kolaborasi.

Prosedur yang berlebihan justru akan mengalami ketergantungan yang bisa menghambat suatu kerjasama tertentu dan tidak dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kerjasama. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi adalah kurangnya semangat dan kurangnya kemauan dalam mengambil risiko. Pasalnya, ketika suatu pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah lain, biasanya terdapat dominasi pemerintah dan tidak adanya kesepakatan yang didasarkan pada pola pikir bersama dan egaliter terkait pekerjaan, yang merupakan prasyarat untuk melakukan kolaborasi. Cara lain untuk menggambarkan kolaborasi adalah sebagai hasil dari keterlibatan berbagai kelompok berkepentingan atau individu

lainnya. Dalam proses ini, kerap kali hal ini diabaikan karena dianggap tidak penting atau tidak diperlukan lagi serta dikendalikan oleh pemerintah dengan pendekatan yang bersifat *top-down*. Selain itu, kolaborasi mungkin terhambat oleh penggunaan strategi yang pecah.

2. Faktor Institusi

Kolaborasi seringkali terjadi akibat kecenderungan institusi, khususnya pemerintah, untuk mengimplementasikan struktur hierarkis pada institusi lainnya yang terlibat dalam menjalin kerjasama atau kolaborasi. Saat ini, banyak institusi yang masih terjebak dalam struktur vertikal yang kaku, di mana akuntabilitas dan pengambilan kebijakan berjalan dalam koridor yang sama, yang dinilai kurang sesuai untuk mencapai kolaborasi optimal. Kolaborasi memerlukan pendekatan horizontal dalam cara kerja dalam kerjasama antara pihak pemerintah dan sektor non-pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Meskipun suatu negara menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis, kolaborasi ini menjadi kunci dalam menciptakan efektivitas dan transparansi, tidak selalu tepat untuk kolaborasi karena demokrasi membutuhkan proses dan formalitas yang lebih kompleks dibandingkan dengan kemitraan yang sejajar.

Kolaborasi Cenderung mempunyai rasa spontanitas karena tidak hanya memerlukan prosedur tersebut menerapkan pendekatan yang ketat dan formal tanpa mengharuskan pelaksanaan prosedur tradisional yang biasanya dilakukan sehari-hari, maupun standar operasional prosedur (SOP) yang umum berlaku dalam organisasi publik dengan struktur mekanistik. Hal ini juga tidak dapat menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan kebutuhan negara demokratis umumnya mencakup aspek akuntabilitas institusi publik. Namun, seringkali akuntabilitas ini bersifat kaku hanya mengacu pada tanggung jawab organisasi atau atasan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu saja. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam konteks ini lebih berkaitan dengan tanggung jawabnya.

3. Faktor Politik

Kolaborasi sering kali terhambat oleh minimnya inovasi dari para pemimpin dalam mencapai tujuan politik yang rumit dan saling bertolak belakang. Memimpin dengan inovasi mengandung arti mampu mendatangkan nilai-nilai dan tujuan yang beragam tersebut membentuk pondasi bagi pemerintahan yang bekerja sama secara baik dan benar, memberikan inspirasi untuk mewujudkan agenda tertentu, serta mencapai hasil yang positif. Kerjasama bisa terhambat apabila pemimpin dari kelompok yang terlibat dalam kolaborasi kurang memiliki inovasi dalam upaya mewujudkan tujuan politik yang penuh kerumitan ini dapat memicu potensi konflik di antara pihak-pihak di masa mendatang nantinya.

Melalui kolaborasi ini, kita dapat mengurangi konflik kepentingan yang sering muncul akibat tujuan yang berbeda antar masing-masing kelompok masyarakat dapat dikurangi. Selain itu, faktor lain yang berkontribusi terhadap keberhasilan kolaborasi adalah dengan melakukan perubahan kepentingan dan kesepakatan antar kepentingan peserta. Kolaborasi juga dapat terhambat oleh perubahan kerja sama tim yang telah terjalin sejak awal kerja tim dan munculnya kepentingan baru yang berbeda di antara anggota tim, termasuk pimpinan dari masing-masing kelompok.

Keterhambatan suatu kolaborasi seringkali diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama yang berkaitan dengan budaya, institusi, dan juga politik. Dalam konteks faktor budaya, kerjasama dapat terhambat dan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, lantaran kebiasaan budaya yang sering cenderung bergantung pada rutinitas dan enggan mempertimbangkan inovasi serta risiko yang akan terjadi. Agar kolaborasi berjalan dengan efektif, para pelayan publik perlu memiliki keterampilan dan kemauan untuk terlibat dalam kemitraan yang praktis dengan penekanan pada pencapaian hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, bergantung pada prosedur dan enggan mengambil risiko dapat menjadi kendala bagi pencapaian efektivitas kolaborasi.

2.2.4 Pencegahan Stunting

Stunting adalah salah satu masalah nasional yang hingga saat ini terus diupayakan penanganannya. Karena dampak permasalahan stunting ini sangat signifikan dalam jangka panjang pada masa depan bangsa yang nantinya akan menjadi beban negara. Stunting ialah isu kekurangan gizi kronis yang timbul akibat pemberian makanan tidak mencukupi kebutuhan gizi anak untuk masa jangka panjang. Masalah ini telah menjadi fokus utama global, terutama di negara-negara yang tengah berkembang, karena dampaknya yang meliputi pertumbuhan anak yang tertunda, daya tahan tubuh yang rendah, keterbatasan kecerdasan, dan rendahnya tingkat produktivitas (Kurniasih, 2010). Hingga hal ini menjadi ancaman berat terhadap eksistensi anak-anak yang merupakan generasi penerus suatu bangsa. Kondisi ini adalah bentuk gangguan pertumbuhan linear yang umumnya dialami oleh anak-anak dengan tanda-tanda status gizi kronis yang menunjukkan terhambatnya pertumbuhan akibat dari kurang gizi dalam jangka waktu yang lama. (Rahmadi, 2016).

Anak yang mengalami stunting diidentifikasi dengan membandingkan panjang atau tinggi badan terhadap standar yang disesuaikan dengan umur dan jenis kelaminnya. Stunting sendiri memiliki banyak patologi perubahan yang dapat ditandai dengan peningkatan retardasi pertumbuhan linier, kesakitan dan kematian, mengurangi kapasitas fisik, perkembangan saraf serta kerugian ekonomi. Stunting merupakan siklus antar generasi. Wanita yang mengenai stunting cenderung melahirkan anak stunting yang berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas ekonomi sehingga meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat yang dapat terjadi terus menerus (Prendergast & Humprey 2014). Anak merupakan generasi penerus yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan suatu bangsa. Mereka adalah aset bangsa yang penting untuk diselamatkan. Saat ini Indonesia sedang menuju Indonesia Emas pada tahun 2045, untuk itu perlu adanya generasi yang sehat dan unggul agar dapat melanjutkan kepemimpinan dan pembangunan bangsa. Namun saat ini masih terdapat anak yang mengalami

Selain itu, pencegahan stunting juga termasuk penebarasan kerjasama antar instansi dalam memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin atau rentan agar memperoleh akses terhadap sumber daya dan informasi tentang gizi serta layanan kesehatan secara merata. Dalam hal ini Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang bersama dengan dinas-dinas lainnya bekerja sama dalam menyediakan program-program untuk menurunkan angka stunting di Kota Malang. Untuk lokus stunting Kota Malang sendiri mulai tahun 2021.

